



PT BPR JWALITA TRENGGALEK PERSERODA

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2025

🏠 Jl. Panglima Sudirman No.35-37 Trenggalek, Trenggalek

☎ 0355796640

📠 0355796639

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024



BAB I

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Jwalita Trenggalek Perseroda mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023



Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR JWALITA TRENGGALEK PERSERODA

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Jwalita Trenggalek Perseroda juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT BPR Jwalita Trenggalek Perseroda sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia



BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	Jl. Panglima Sudirman No.35-37 Trenggalek, Trenggalek
Nomor Telepon	:	0355796640
Penjelasan Umum	:	Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	- Manajemen PT BPR Jwalita Trenggalek Perseroda telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3503065512780001
	Nama	: DWI FRAIDIANRIANI, SE.MM
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan BPR
		2. Memimpin dan mengkoordinasikan kantor sehari-hari utamanya dari sisi bisnis sehingga berjalan baik
		3. Menterjemahkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku
		4. Memastikan bahwa ketentuan GCG berjalan



		sebagaimana mestinya
		5. Memantau efektifitas kerja audit intern dan menindaklanjuti hasil temuan audit
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3503114209800004
	Nama	: LINDA WULANINGTYAS, SE
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati hatian 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan 3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan 4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Jasa Keuangan terkini dan Peraturan Perundang undangan lain yang relevan 5. Melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja , sistem dan prosedur kepatuhan telah berjalan efektif
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem		

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3503110608540004
	Nama	: DR.IR.H. MULYADI WR, MMT
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggarannya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi



		Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3503061606660002
	Nama	: DRS. EDY SOEPRİYANTO
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggarannya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR
Rekomendasi Kepada Direksi		
Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
2	Komite Pemantau Risiko	



	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3503065512780001	DWI FRAIDIANRIANI, SE.MM	-	-	-	-
2	3503114209800004	LINDA WULANINGTYAS, SE	-	-	-	-



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3503110608540004	DR.IR.H. MULYADI WR, MMT	-	-	-	-
2	3503061606660002	DRS. EDY SOEPRIYANTO	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3503065512780001	DWI FRAIDIANRIANI, SE.MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3503114209800004	LINDA WULANINGTYAS, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3503110608540004	DR.IR.H. MULYADI WR, MMT	tidak ada	tidak ada	HJ. PENNY SUGIHARTI-Ada hubungan
2	3503061606660002	DRS. EDY SOEPRIYANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada



F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3503065512780001	DWI FRAIDIANRIANI, SE.MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3503114209800004	LINDA WULANINGTYAS, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3503110608540004	DR.IR.H. MULYADI WR, MMT	tidak ada	tidak ada	HJ. PENNY SUGIHARTI-Istri
2	3503061606660002	DRS. EDY SOEPRIYANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	313.335.000	2	141.492.000
2	Tunjangan	2	104.445.000	2	47.164.000
3	Tantiem	2	76.135.453	2	30.496.833
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Renumerasi			493.915.453		219.152.833
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	0	0	0	0
2	Transportasi	0	0	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4	Fasilitas lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			493.915.453		219.152.833



H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,83
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,39
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,14
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,39
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,51



I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-7-5	5	Evaluasi Kinerja Semester I PT.BPR Jwalita Trenggalek Perseroda dan Pencapaian RBB 2025 1. Laporan Kinerja di bulan Maret 2025 menunjukan kinerja baik, namun demikian masih harus ditingkatkan lagi kreditnya khususnya UMKM Mikro (Pedagang Pasar) 2. Inovasi Kredit PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk di sosialisasikan Ke SMK se Kabupaten Trenggalek 3. Kerjasama dengan Dinas Prinaker dan LPK untuk memberangkatkan lulusan SMK dengan biaya gratis untuk belajar bahasa 4. Penyertaan Modal PT.BPR Jwalita Trenggalek Perseroda dalam pembahasan PansusDPRD untuk dimonitoring progresnya
2	2025-7-14	5	Pembahasan Rapat : 1. Bupati menyetujui Direksi PT.BPR Jwalita Trenggalek Perseroda untuk kerjasama dengan bank Permata, terkait penyelenggaraan Co Branding ATM Comunity Card. untuk mempersiapkan P3K di PT.BPR Jwalita Trenggalek Perseroda 2. Terkait Surat dari KSPP Syariah Madani Jawa Timur, permohonan pelunasan sebelum jatuh tempo dan penyelesaian dari penjualan Asset, maka PT.BPR Jwalita Trenggalek Perseroda diminta menggandeng KJPP untuk penilaian Asset untuk ditawarkan kepihak ketiga / investor untuk membantu penjualan dan digunakan melunasi pinjaman 3. Pembiayaan KJPP untuk dibiayakan PT.BPR Jwalita Trenggalek Perseroda karena untuk mitigasi Risiko Kredit
3	2025-9-19	5	Pembahasan Rapat : 1. Evaluasi Kinerja Keuangan PT.BPR Jwalita Trenggalek Perseroda Triwulan Ke 3 tahun 2025, Pertumbuhan kredit untuk ditingkatkan. Mengkatkan outstanding Kredit UMKM, Meningkatkan dana Pihak Ke Tiga, menurunkan NPL, Pendekatan Nasabah Prioritas, menggali Potensi daerah dan promosi sari pasar ke pasar serta UMKM 2. Pencapaian Rencana Bisnis dan Program-program baru PT.BPR Jwalita Trenggalek Perseroda tahun 2025 ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti dan terealisasi seperti PPPK 3. Penyelesaian kredit bermasalah melalui SKK di Kejaksaan Negeri Trenggalek untuk diajukan 3 nasabah yaitu Sumarji (Kas Kampak), Edy P (Kas Durenan) DAN Samugi (Kas Gandusari)
4	2026-11-18	3	Pembahasan Rapat : 1. Direksi PT.BPR Jwalita Trenggalek Perseroda diminta mengembangkan Produk-produk BPR yang berpihak ke masyarakat dengan bunga murah dan pelayanan sampai ke pelosok-pelosok di Kabupaten Trenggalek 2. Direksi PT.BPR Jwalita Trenggalek Perseroda fokus ke pencapaian target tahun 2025 segai berikut : Manajemen dan Tata Kelola yang baik, Peningkatan Outstanding Kredit dengan prinsip kehati-hatian, Pengembangan produk unggulan dan pengembangan produk yang sudah ada, Pelayanan masyarakat, Menurunkan NPL, Manajemen Risiko, Tehnologi dan Kepatuhan 3. Kualitas kredit dijaga dengan baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian 4. Penyelesaian kredit bermasalah dengan kerjasama dengan APH
5	2025-12-15		Pembahasan Rapat : 1. Menerima dan menyetujui Rencana Bisnis PT.BPR Jwalita Trenggalek Perseroda Tahun 2026 sebagai berikut : Tabungan Rp. 63.046.901.252,- , Deposito Rp. 80.395.180.000,- , Kredit Rp. 131.816.789.163,- , Total Aset Rp. 191.274.084.383,- , Pendapatan Operasioal Rp. 20.951.345.362,- , Biaya Operasional Rp. 17.413.477.258,- , Laba Tahun Berjalan Rp. 2.712.504.240,- Rencana Direksi Tahun 2026 : Pembian Asset Kantor Pusat, Pembukaan Kantor Kas Bendungan, Renovasi Kantor Durenan Ext BPR Bangkit, Sertifikasi Dirut & Direktur, Pengembangan Trenggalek Access (Branding Digital), Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Direksi, Sertifikasi Penilaian Jaminan Oleh Pegawai BPR, Remunerasi (dana pensiun) Pengurus dan Pegawai PT.BPR Jwalita Trenggalek Perseroda dengan dasar Perhitungan ditentukan oleh Aktuaris sesuai Permendagri No. 21 tahun 2024, Menerima dan menyetujui Fasilitas Bantuan Hukum untuk Pengurus PT.BPR Jwalita Trenggalek Perseroda apabila dibutuhkan sesuai Permendagri No.21 tahun 2024 (apabila dibutuhkan) 2. Menerima dan Menyetujui Program Baru PT.BPR Jwalita Trenggalek Perseroda Tahun 2026 sebagai berikut : Kredit Emas, Tabungan Emas, Simarmas, PPPK dan BLUD 3. Kerjasama dengan BPR Milik Daerah lain terkait Pembiayaan Kredit (seperti PPPK dll)



J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3503110608540004	DR.IR.H. MULYADI WR, MMT	5	0	100,00%
2	3503061606660002	DRS. EDY SOEPRIYANTO	0	5	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-07-30	Sosial	Bantuan pengadaan printer kepada Dinas PMD Kabupaten Trenggalek	Dinas PMD Kabupaten Trenggalek		7.600.000
2	2025-08-14	Sosial	Bantuan tenda untuk UMKM binaan PT.BPR Jwalita Trenggalek Perseroda	UMKM binaan BPR		21.000.000



3	2025-08-27	Sosial	1. Kirap Hari Jadi Kabupataen Trenggalek 2. TGX Ekpo Tahun 2025 3. Festifal Jaranan Trenggalek 2025sipasi Kegiatan Pemkab Trenggalek	Pemkab Trenggalek		9.667.800
4	2025-09-11	Sosial	1.Periksa mata gratis 2. Santunan anak yatim As-Syafiyah 3.Bedah rumah Baznas 4. Donasi bencana banjir Sumatera 5.Kegiatan bulan dana PMI 5. Gangsar subsidi 6. Santunan anak yati ds. sumurup	Tersebut		15.995.300
5	2025-12-23	Sosial	Launching program sangu sampah	Pemkab Trenggalek		5.173.200
6	2025-09-24	Sosial	1.Twostroke Fighter 2025 2.Bola Voli antar desa di kec.Trenggalek 3.Bola voli Ds.Dongko 4.Bola Voli Ds.Pule 5. Runarchy 6.Trenggalek Night Run Hut TNI 7. Fine Bike Ds.Karangan 8.Senam sehat hari ikan nasional 9.Gerak jalan kreasi Ds.Pule	Kegitan di wilayah kabupaten Trenggalek		7.350.000
7	2025-10-16	Sosial	1.Lomba burung berkicau 2.Gapura Dsn. Krajan Munjungan 3. Kigitan paguyuban pedagang pasar kamulan	1.Paguyuban burung kicau 2.Dsn Krajan Munjungan 3. Pasar Kamulan Durenan		3.500.000
8	2025-10-25	Sosial	1.Sponsor sholawatan dan pengajian 2. Renovasi atap Masjid 3. Maulud Nabi 4. Pengajian umum Ds. Jatiprahu Karangn	Panitia Sholawatan Akbar Trenggalek, Takmir Masjid Agung Trenggalek, Panitia Maulud Nabi Ds. Karanganyar Pule		4.750.000
9	2025-11-14	Sosial	1.Eduprintis Kec. Pogalan,Suruh, Durenan,Kampak , Watulimo, 2.Dinas Pendidikan Kab. Trenggalek 3.Ds. Ngepeh Kec.Tugu 4.Ds. Karangturi Kec. Munjungan	Kec.Pogalan, Kec.Suruh, Kec, Gandusari, Kec.Kampak, Kec.Watulimo, Dinas Pendidikan Kab. Trenggalek, Ds.Ngepeh Tugu, Ds. Karangturi Munjungan		15.642.000



O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Jwalita Trenggalek Perseroda ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Jwalita Trenggalek Perseroda. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Jwalita Trenggalek Perseroda ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Jwalita Trenggalek Perseroda, Terima Kasih.

Trenggalek, 25 Maret 2026

Persetujuan Pengurus PT BPR Jwalita Trenggalek Perseroda

DR.IR.H. MULYADI WR, MMT
Komisaris Utama

DWI FRAIDIANRIANI, SE.MM
Direktur Utama